



## Rakit yang Terombang-Ambing: Ambivalensi Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang pada Masa Revolusi

### The Drifting Raft: Ambivalence in Political Attitudes and Economic Orientation of the Chinese in Palembang during the Revolution

Jumhari\*, Badan Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Indonesia

#### ABSTRACT

The revolutionary period was a time of upheaval and uncertainty for economic actors, including the Chinese community that played a dominant role in Indonesia's economy. During this time, the Chinese engaged in business and trade were caught between two competing powers vying for political and economic influence: the Republic of Indonesia's government and the Dutch government attempting to reassert its imperialist control. Their position was fraught with dilemmas, as they had to navigate conflicting political stances and economic interests. Palembang, as a strategically significant region outside Java with transnational economic connections, particularly with Singapore as a trading hub in Southeast Asia, became a key battleground for political and economic struggles impacting the Chinese community. This article aims to depict the various social, political, and economic realities faced by the Chinese in Palembang during this transitional period of power shifts, using a socio-historical approach.

#### ARTICLE HISTORY

Received 10/06/2024  
Revised 11/06/2024  
Accepted 13/06/2024  
Published 15/06/2024

#### KEYWORDS

Ambivalence of political attitudes; economic orientations; Chinese; Palembang; revolutionary period.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [jumhari@gmail.com](mailto:jumhari@gmail.com)

#### PENDAHULUAN

Diskursus mengenai relasi antara kelompok etnik Cina di tanah air kita dengan masyarakat pribumi dan pemerintahan yang sedang berkuasa senantiasa menarik untuk diperbincangkan terkait dengan kepentingan ekonomi dan sikap politik di mana mereka berada. Seolah menjadi takdir yang harus diterima, ketika muncul krisis ekonomi atau politik yang bermuara pada konflik sosial, orang Cina sering kali menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan dari kelompok pribumi. Kelompok ini acap kali menjadi kambing hitam atas berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Posisi dilematis yang dialami oleh kelompok etnik Cina, di mana pun mereka tinggal, adalah antara melayani kepentingan penguasa dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar mereka. Masa transisi dalam pemerintahan sering kali menimbulkan ketegangan sosial yang bermuara pada konflik antara pribumi dengan non-pribumi (Cina), sebagaimana yang disinyalir oleh Lindayanti mengenai konflik SARA di beberapa wilayah Indonesia menjelang runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, khususnya di pulau Jawa (Jakarta dan Solo) serta di Palembang pada masa revolusi (Sedyawati & Zuhdi, [2001](#)).

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdampak luas, tidak hanya menghapuskan penindasan terhadap kelompok pribumi oleh penjajah, tetapi juga menghancurkan bangunan sosial yang ada sebelumnya, seperti terhapusnya strata masyarakat kolonial berdasarkan ras, termasuk berubahnya posisi etnik Cina di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan kebijakan politik segregasi sosial (*Regering Almanak 1854*), masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang. Kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua oleh orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk Cina, Arab, dan orang Asia lainnya, sedangkan mayoritas pribumi berada pada strata yang paling bawah (Wertheim, [1999](#)). Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan hunian berdasarkan kelompok etnik tertentu. Di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial, seperti Batavia, Semarang, termasuk Palembang, dijumpai nama-nama kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis, dan kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik (Lohanda, [2001](#)).

Perubahan konstelasi politik di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 berpengaruh pada kehidupan sosial politik dan ekonomi orang Cina di Indonesia, termasuk identifikasi diri, sikap politik, dan kepentingan ekonomi



mereka. Persoalan identifikasi diri terhadap negara tempat mereka bermukim merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang Cina perantauan, sebagaimana dikemukakan oleh Leo Suryadinata (Poerwanto & Sudrajat, [2005](#)). Meskipun banyak orang Cina yang telah lama tinggal di Indonesia dan sudah meninggalkan identitas ke-Cinaannya serta mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat pribumi, mereka belum tentu dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Selama ini, kita cenderung melihat orang Cina di Indonesia sebagai kelompok masyarakat yang homogen, padahal mereka berasal dari tempat dan suku bangsa yang berbeda. Umumnya, orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia berasal dari daerah Fukien dan Kwantung (Cina bagian Selatan). Orang Indonesia menggolongkan mereka ke dalam dua golongan, yakni Peranakan dan Totok (Koentjaraningrat, [1975](#)). Orang Cina Totok pada umumnya lebih menganggap diri mereka sebagai bagian dari bangsa Cina, sedangkan orang Cina Peranakan terbagi antara golongan “integrasi” dan “asimilatif”. Golongan integrasi mempertahankan identitas Cina Peranakan, sedangkan golongan asimilatif menginginkan peleburan minoritas Cina dalam masyarakat pribumi (Suryadinata, [1986](#))

Nasionalisme Cina yang muncul pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda mendorong komunitas Cina menggabungkan kelompok mereka dalam suatu organisasi yang disebut Tiong Hoa Hwee Koan (THKK). Organisasi ini mendirikan sekolah dengan pengantar bahasa Cina di seluruh Jawa. Pembentukan THKK diikuti dengan munculnya surat kabar Cina Peranakan berbahasa Melayu Cina seperti *Li Po* (1901 di Sukabumi), *Chabar Perniagaan* (1903, Batavia), *Pewartar Soerabaia* (1902, Surabaya), dan *Djawa Tengah* (Semarang, 1909) (Suryadinata & Hardoyo, [1986](#)). Pada tahun 1927, didirikan Chung Hua Hui, sebuah organisasi yang dimotori oleh kelompok cendekiawan Peranakan yang memperoleh pendidikan Belanda dan mewakili orang Cina di Volksraad.

Ambiguitas sikap politik orang Cina di Indonesia pada awal kemerdekaan merupakan warisan sejarah sebagai akibat penerapan kebijakan politik kewarganegaraan yang bersifat bipatride (berkewarganegaraan ganda). Status kewarganegaraan Cina di Hindia Belanda berdasarkan asas *ius soli*, menurut Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) tahun 1910, menyatakan bahwa orang Cina di Hindia Belanda merupakan kawula Belanda. Kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari Undang-Undang Kebangsaan yang dikeluarkan pemerintahan Kaisar Cina pada tahun 1910, yang menganggap bahwa setiap anak yang lahir dari orang tua beretnik Cina otomatis berkebangsaan Cina (Suryadinata & Hardoyo, [1986](#)). Kontroversi mengenai status kewarganegaraan inilah yang membuat mereka bersikap ragu dalam menentukan sikap politik setelah kemerdekaan Indonesia.

Sikap politik orang Cina yang cenderung ambivalen pada awal kemerdekaan membuat posisi mereka berada dalam pusaran tarik-menarik antara mendukung pemerintah RI atau menjaga kesetiaan tradisional mereka kepada Belanda. Ketidakjelasan sikap politik ini menimbulkan kecurigaan dari kaum Republik, terutama terhadap kelompok Cina yang bekerjasama dan dimanfaatkan oleh pihak Belanda pada periode ini. Akibat prasangka tersebut, orang Cina menjadi korban kekerasan sosial seperti yang terjadi di Tangerang dan Kebumen pada tahun 1946 serta di Palembang pada tahun 1947. Gerakan anti-Cina di Palembang pada awal Januari 1947 menelan korban 250 orang terbunuh dan 600 orang dinyatakan hilang (Koentjaraningrat, [1975](#)). Peristiwa “Pertempuran Lima Hari Lima Malam” yang terjadi antara pihak Republik dengan tentara NICA pada awal Januari 1947 mengubah sikap kelompok Cina di Palembang. Banyak tokoh masyarakat Cina yang lolos dari pertempuran melarikan diri ke Singapura dan membentuk Himpunan Persahabatan Cina Palembang (HPCP). Mayoritas kelompok Cina yang tinggal di Palembang bersikap netral di tengah ketidakpastian, meskipun ada beberapa yang mulai bersikap pro-Republik (Zed, [2003](#)).

Para pengungsi Cina Palembang di Singapura menjadikan tempat ini sebagai basis konsolidasi dan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Singapura menjadi pilihan tepat karena merupakan bandar perdagangan penting di wilayah perairan Malaka dan berada di luar kontrol Belanda. Peristiwa tahun 1947 juga memunculkan kerja sama antara penguasa Republik dengan pengusaha Cina, termasuk kaum Totok, dalam bentuk penyelundupan (perdagangan gelap) yang mempertautkan kepentingan mereka (Yang, Danarto, & Mustofa, [2007](#)). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial, politik, dan ekonomi orang Cina di Palembang pada masa revolusi, terkait dengan transisi dan transformasi kekuasaan pemerintahan dan implikasinya terhadap orang Cina di daerah ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah untuk menggambarkan realitas sosial, politik, dan ekonomi komunitas Cina di Palembang selama masa revolusi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai ambivalensi sikap politik dan orientasi ekonomi komunitas Cina. Penelitian dilakukan di Palembang, dengan subjek penelitian mencakup komunitas Cina, baik

Totok maupun Peranakan, serta interaksi mereka dengan pemerintah dan masyarakat pribumi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait, serta data sekunder dari dokumen sejarah, arsip kolonial, catatan pemerintah, surat kabar, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai realitas sosial, politik, dan ekonomi komunitas Cina di Palembang selama masa revolusi, serta memahami ambivalensi sikap politik dan orientasi ekonomi mereka dalam konteks perubahan kekuasaan yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### Komunitas Cina di Palembang pada Masa Revolusi

Sejarah keberadaan etnik Cina di Palembang barangkali sama tuanya dengan umur kota Palembang itu sendiri. Bahkan, bagi orang Cina, Palembang bukanlah wilayah baru. Pada masa lampau, wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan seorang perantau Cina, Liau Tau Ming, pasca keruntuhan Kerajaan Sriwijaya (Hanafiah, [1995](#)). Pada masa Kesultanan Palembang, posisi orang Cina sebagai kelompok *middleman* cukup penting, meskipun dibandingkan dengan orang Arab, mereka masih kalah. Orang Arab di Palembang pada masa ini tidak hanya menguasai sektor ekonomi, tetapi juga masuk dalam lingkaran kekuasaan, mungkin karena kedekatan kultural, terutama faktor agama yang sama antara Sultan dan orang Arab (Sevenhoven & Purbakawatja, [1971](#)).

Pada tahun-tahun permulaan abad ke-20, dari perspektif ekonomi dan politik kolonial Belanda, masa ini dipandang sebagai puncak terwujudnya *Pax Neerlandica* (Kartodirjo, [1993](#)). Pasifikasi terhadap daerah-daerah luar Jawa telah berakhir, bersamaan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan yang meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi neo-merkantilisme kolonial Belanda sebagai akibat kemenangan kaum liberal di Belanda pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Palembang dianggap sebagai salah satu kawasan "daerah untung" (*wingegewesten*) di luar Jawa dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial. Daerah Palembang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, yang ditandai dengan terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi kolonial, dimulai dengan pembukaan perkebunan (tembakau, kopi, dan karet) serta eksplorasi di bidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara) (Zed, [2003](#)).

Palembang ditetapkan sebagai *Gemeente* dengan Stbl. No. 126 tanggal 1 April 1906 (terakhir diperbarui dengan Stbl. 1924 no. 543). *Gemeente Raad* awalnya dipimpin oleh *Hoofd van Plaatselijk Bestuur (Controleur)*, kemudian berdasarkan Stbl. 191924 no. 138, *Gemeente* Palembang dipimpin oleh *Burgemeester* (walikota). Lahirnya *Gemeente*, yang dalam istilah penduduk Palembang disebut Haminte, tidak otomatis menjadikan Palembang daerah otonom dengan pembangunan terencana. Pada saat itu, Palembang belum memiliki *stadplan* (perencanaan kota). Rancangan kota Palembang baru dilaksanakan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1929, setelah seorang planolog, Ir. Thomas Karsten, ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk merencanakan dan membenahi kota Palembang (Utomo, [2005](#)).

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, jumlah orang Cina di Palembang berjumlah 26.066 orang yang tersebar di tiga daerah, yakni Ilir (18.922 orang), Ulu (5.523 orang), serta Ogan dan Komering (1.621 orang). Perkembangan ekonomi Palembang yang pesat pada dasawarsa kedua abad ke-20 menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai kelompok masyarakat seperti Jawa dan Sunda, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 65.000 orang pada tahun 1930. Mereka didatangkan ke Palembang sebagai bagian dari program transmigrasi oleh pemerintah kolonial, seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan swasta, proyek pemerintah, serta lapangan kerja lainnya.

Pada awal kemerdekaan, orang Cina yang tinggal di Palembang berjumlah 40.000 orang, yang digolongkan ke dalam dua kelompok: 25.000 orang Cina Totok dan 15.000 orang peranakan (Sedyawati & Zuhi, [2001](#)). Berbeda dengan perantau Cina yang umumnya bekerja sebagai buruh perkebunan (Sumatera Timur) atau pekerja tambang di Belitung, orang Cina di Palembang merupakan pekerja bebas. Sektor perdagangan merupakan bidang yang banyak digeluti oleh orang Cina di Palembang. Mereka menguasai berbagai jenis komoditas perdagangan di semua level, dari pengecer hingga pedagang besar. Bahkan, sektor perdagangan karet yang semula dikuasai oleh pedagang Melayu hingga akhir tahun 1920-an, mulai dikuasai oleh pedagang Cina seiring dengan meningkatnya permintaan komoditas karet di pasar dunia (Wibowo, [1999](#)).

Pada dasawarsa 1930-an, orang-orang Cina telah mendominasi perdagangan perantara komoditas karet serta memiliki pabrik pengolahan karet terbesar di Palembang, yakni Hong Tong, milik orang Cina yang tinggal di Singapura, serta Kiang Gwan, sebuah perusahaan dagang dari kelompok Oei Tiong Ham, yang merupakan kelompok usaha etnis terbesar di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia II. Kiang Gwan memiliki cabang di Bombay, Kalkuta, Karachi, Shanghai, Hong Kong, Amoy, Singapura, dan London. Orang Cina juga mendominasi sektor transportasi air (perkapalan), misalnya armada perkapalan Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi yang melayani rute domestik serta rute internasional (Singapura, Hong Kong, Eropa, dan Amerika Serikat) (Zed, [2003](#)). Selain itu, para pedagang Cina di Palembang pada masa itu bergerak dari lingkaran pedesaan hingga tingkat regional (Irwan, Alexander).

Ekspansi Jepang ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada awal tahun 1940-an telah mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tak terkecuali di daerah Palembang. Dalam peta imperialisme Jepang, Palembang menempati posisi strategis karena Sumatera bersama Semenanjung Malaya masuk ke dalam kawasan inti (utama) menurut garis politik ekspansi Jepang, selain karena letaknya yang strategis, juga karena sumber daya alamnya yang melimpah (Zed, [2003](#)).

Hari-hari pertama pendudukan Jepang di Palembang diliputi suasana panik. Masyarakat kebanyakan terlihat pasrah, sedangkan pegawai pemerintah sibuk membakar dokumen dan arsip. Banyak bangunan penting dibakar, serta kilang minyak diledakkan. Kota Palembang diwarnai dengan suasana pengungsian, termasuk dari mereka yang lari dari Singapura menjelang Perang Dunia II. Di antara mereka banyak orang Cina, selain orang Australia dan Inggris. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang diproklamkan oleh Soekarno dan Hatta, baru diterima dan disiarkan oleh harian Palembang Shimboen pada tanggal 21 Agustus. Untuk mengendalikan situasi Palembang pasca proklamasi, pemerintah Jepang mengumpulkan tokoh-tokoh penting di Palembang, termasuk Yap Tjang Ho (perwakilan Cina) untuk mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak serta merta membuat kehidupan masyarakat berjalan normal. Kenyataannya, orang Cina di Palembang mengalami perlakuan buruk setelah munculnya gerakan anti-Cina pada bulan-bulan terakhir 1945. Banyak orang Cina yang mengungsi dan mengalihkan basis usaha perdagangan mereka ke Singapura. Jumlah orang Cina yang mengungsi mencapai 5.000 orang, dengan pengungsi Cina Palembang berjumlah 3.000 orang (Zed, [2003](#)).

### Ambivalensi Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Masa Revolusi

Pada akhir 1945, gerakan anti-Cina di Palembang serta kondisi yang tidak aman akibat pertempuran antara pihak Republik dan NICA yang menggantikan Sekutu telah menempatkan etnik Cina Palembang dalam posisi yang sulit dan dilematis. Keadaan semakin memburuk sejak terjadinya peristiwa "Pertempuran Lima Hari Lima Malam" di Palembang pada awal Januari 1947, yang menelan korban jiwa yang sebagian besar adalah orang Cina. Menurut Konsul Cina di Jakarta, jumlah orang Cina yang terbunuh mencapai 250 orang, 1.000 orang terluka, 600 orang hilang, dan 900 orang kehilangan tempat tinggal. Sebagian besar orang Cina Palembang mengungsi ke Singapura, menjadikan Singapura sebagai basis perlawanan orang Cina yang anti-Belanda, sedangkan mayoritas orang Cina yang tinggal di Palembang cenderung bersikap netral. Meskipun demikian, ada beberapa kelompok yang menentang Belanda dan bersimpati kepada pihak Republik. Salah satunya adalah CLU (Chinese Labour Union), organisasi perkumpulan buruh Cina yang dipimpin oleh Liem Djie Lan. Kelompok ini menuntut ganti rugi kepada pemerintah Belanda atas kerugian yang dialami orang Cina. Karena permintaan tersebut ditolak Belanda, mereka mengajukan mosi untuk menghapuskan jabatan "Kapiten Cina" di Palembang, yang saat itu dijabat Liem Sioe Sing (Zed, [2003](#)).

Berkaitan dengan banyaknya korban kerusuhan anti-Cina di Indonesia, termasuk di Palembang, Konsul Cina di Jakarta, Tjiang Chia, mengeluarkan pernyataan yang berisi himbuan agar orang Cina bersikap netral dalam menghadapi pertikaian antara pihak Republik dan Belanda. Konsul Cina di Jakarta juga meminta agar orang Cina yang bergabung dalam pasukan Belanda menarik diri. Peristiwa di Palembang mengundang solidaritas dari kelompok Cina perantauan. Pada 27 Januari 1947, di Singapura diadakan pertemuan yang intinya menyepakati pembentukan asosiasi Cina perantauan untuk menyelesaikan masalah di Palembang. Usaha ini tidak banyak membuahkan hasil, kecuali dalam urusan perdagangan. Persoalan ini kemudian diambil alih oleh Asosiasi Cina Perantauan di Nan Yang (Nan Chiao Tsung-Hui, NCTH). Terkait persoalan "Kapiten Cina" di Palembang, pada 13 April 1947 diadakan pertemuan Federasi Cina Perantauan di Singapura yang dihadiri oleh Konsul Cina. Usulan penghapusan Kapiten Cina diajukan oleh Khe Chin dengan maksud menghindari dualisme kepemimpinan Cina di Palembang. Sejak Januari 1946, secara resmi orang Cina

di Palembang berada di bawah kepengurusan Federasi Cina Perantauan (Chung Hua Tsung Hui) yang berpusat di Singapura, sementara di Palembang sendiri masih ada Kapiten Cina yang merupakan lembaga bentukan penguasa kolonial Belanda.

Kelompok Cina Totok menyetujui usulan penghapusan Kapiten Cina di Palembang, sedangkan kelompok Cina Peranakan yang dipimpin oleh Liem Sioe Sing menentangnya. Mereka beralasan bahwa persoalan kolonialisme merupakan persoalan antara Indonesia dan Belanda, sedangkan orang Cina di luar masalah tersebut. Alasan lainnya adalah bahwa seorang Kapiten Cina diangkat oleh pemerintah, sementara Federasi Cina Perantauan hanya merupakan perwakilan Cina dan tidak berada dalam struktur pemerintahan. Akhirnya, pertemuan tersebut tidak membawa hasil, yang pada gilirannya justru menjadikan posisi orang Cina di Palembang semakin dilematis antara kesetiaan kepada Kapiten Cina di Palembang atau mengikuti instruksi dari Konsul Cina Pusat di Singapura.

Karakteristik perdagangan Cina pada masa revolusi di Indonesia, termasuk Palembang, dibagi oleh Twang Pek Yang menjadi dua tipe. Pertama adalah "*dangbangke*", yakni sekelompok pedagang kecil yang berkembang pesat pada masa pendudukan Jepang. Mereka biasanya bergerak dalam perdagangan skala kecil, terutama menjual barang-barang berharga seperti emas, permata, dan opium. Kedua adalah "*lianho*" (gabungan firma-firma), yang merupakan kelompok pedagang besar dengan wilayah operasi yang lebih (Yang et al., 2007). Tipe pertama banyak beroperasi di Pulau Jawa, sedangkan di luar Jawa, termasuk Palembang, lebih banyak tipe *lianho*. Meskipun demikian, menurut Mestika Zed, tipe *dangbangke* dalam lingkup yang lebih kecil juga dijalankan di Palembang. Mereka bekerja sama dengan para pedagang *ngulo* yang beroperasi di daerah pedalaman Sumatera Selatan (Palembang) (Zed, 2003).

Keterampilan dan keberhasilan orang Cina di Palembang yang memiliki jaringan erat dengan pedagang-pedagang besar di Singapura dimanfaatkan oleh pihak Republik. Pada masa agresi pertama tahun 1947, terjalin hubungan erat antara pedagang Cina di Palembang dengan kelompok pejuang Republik, salah satunya Dr. A.K. Gani yang merupakan wakil pemerintah pusat untuk daerah Sumatera bagian Selatan. Kerjasama ini berjalan secara diam-diam, meskipun pola kerjasama ini telah banyak membantu kepentingan pemerintah Republik. Dalam konteks kerjasama di atas, posisi kelompok Totok lebih baik dibandingkan kelompok Cina Peranakan. Mereka bisa berhubungan dan menjalin kerjasama dengan kelompok penguasa Republik serta kelompok lainnya. Sedangkan kelompok Peranakan lebih terisolir, baik dengan sesama orang Cina maupun dari kelompok pribumi. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara kelompok Cina Totok dengan penguasa Republik, misalnya ketika diberlakukan blokade ekonomi oleh Belanda, penguasa RI di Sumatera Selatan memanfaatkan kelompok pedagang Cina ini sebagai perantara dalam perdagangan gelap, yakni menjual hasil komoditas perkebunan dan minyak bumi untuk ditukar dengan senjata. Salah satu pedagang tersebut adalah Wang Yuanzin yang tergabung dalam SOIEA (Singapura) dan dipercaya oleh A.K. Gani sebagai penghubung dengan pedagang Cina di Singapura.

Realitas sosial, politik, dan ekonomi di Palembang menyebabkan para pedagang Cina harus berinteraksi baik dengan kelompok penguasa Republik maupun dengan Belanda. Untuk melancarkan kegiatan perekonomiannya, mereka harus pandai menyesuaikan diri. Para pedagang Cina tiap bulan menyumbangkan f. 1000,00 kepada pihak Republik (Biro Sosial Indonesia). Di sisi lain, mereka juga bertindak sebagai agen penyalur barang untuk memenuhi kepentingan ekonomi Belanda. Posisi demikian kadang membuat orang Cina serba dilematis, misalnya ketika terjadi fluktuasi nilai tukar kurs mata uang Gulden yang menyebabkan harga melonjak tajam pada bulan Maret 1947 (Zed, 2003). Para pedagang Cina dicurigai oleh pihak Belanda telah bertindak spekulatif dengan mencari keuntungan besar. Perasaan curiga dan ketidakpuasan dari pemerintah Belanda terhadap orang Cina juga muncul dalam penentuan harga jual barang yang berbeda. Barang yang dijual kepada Belanda harganya lebih mahal dibandingkan untuk pribumi.

## SIMPULAN

Ambivalensi sikap politik dan ekonomi orang Cina di Palembang pada masa revolusi bukanlah proses yang berjalan dengan sendirinya. Realitas sosial dan ekonomi menempatkan kelompok ini dalam posisi yang serba dilematis. Sikap yang mendua ini merupakan bagian dari proses sejarah yang menempatkan mereka di persimpangan jalan. Ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi posisi mereka, yaitu tarik-menarik kepentingan antara penguasa Belanda dengan pemerintah Cina dalam masalah kewarganegaraan pada masa kolonial, serta loyalitas politik kepada Republik dan Belanda pada masa revolusi. Sebagai kelompok yang mengandalkan perdagangan (ekonomi) sebagai tulang punggung kehidupan, kelangsungan hidup mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu beradaptasi dan mengakomodasi kepentingan pihak berkuasa di mana mereka berada. Loyalitas mereka kepada kepentingan ekonomi jauh lebih besar daripada loyalitas politik. Hal ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi mereka sendiri,



seperti terlihat pada gerakan anti-Cina di Palembang pada akhir 1945, yang kemudian disusul dengan peristiwa awal Januari 1947. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap kekerasan bermotif Suku, Ras, dan Agama (SARA). Perbedaan pendapat dalam lingkup internal orang Cina juga menyebabkan sulitnya menentukan sikap politik terhadap penguasa, seperti perbedaan antara kelompok Totok dan Peranakan yang berbeda dalam orientasi politik dan budaya. Dalam kasus Palembang, terlihat fragmentasi sikap orang Cina pada masa revolusi. Orang Cina Totok lebih dekat dan bisa bekerja sama dengan penguasa Republik Indonesia di Sumatera Selatan dalam urusan ekonomi, sedangkan kelompok Peranakan cenderung terisolasi.

## REFERENSI

- Hanafiah, D. (1995). *Melayu Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Kartodirjo, S. (1993). *Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1975). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lohanda, M. (2001). *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Djambatan.
- Poerwanto, H., & Sudrajat, E. (2005). *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sedyawati, E., & Zuhdi, S. (2001). *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A. B. Lopian*. Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Sevenhoven, J. I. Van, & Purbakawatja, S. (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Suryadinata, L. (1986). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti press.
- Suryadinata, L., & Hardoyo, F. S. (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Utomo, B. B. (2005). *Kota Palembang: Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Wertheim, W. F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wibowo, I. (1999). *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi "Masalah Cina."* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yang, T. P., Danarto, A., & Mustofa, H. (2007). *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Jakarta: Diadit Media.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan, Politik dan Revolusi : Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES.